

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENERTIBAN
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT
DI KECAMATAN LAWANG KIDUL
KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

MARINI FARIDA SARI

07011181419007

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Indralaya, Ogan Ilir

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 6 Juni 2018.

Palembang, Juli 2017

Ketua:

1. Drs. Gatot Budiarto, Ms
NIP. 195806091984031002

Anggota:

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003

3. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENERTIBAN
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT
DI KECAMATAN LAWANG KIDUL
KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

MARINI FARIDA SARI

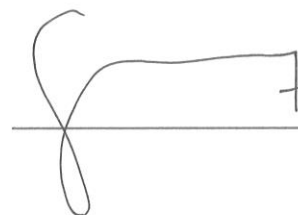
07011181419007

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Mei 2018

Pembimbing I

Drs. Gatot Budiarto, MS

NIP. 195806091984031002



Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si

NIP.19621125198921001



MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Apabila Anda Berbuat Kebaikan Kepada Orang Lain, Maka Anda Telah Berbuat Baik Terhadap Diri Sendiri”.(Benyamin Franklin)

Dengan rahmat Allah Subhanahuwata'ala,

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Duni dan ibu Darti
2. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan motivasinya
3. Sahabat dan orang-orang terdekatku yang selalu memberikan semangat
4. Teman seperjuangan FISIP angkatan 2014 yang tidak lelah memotivasi
5. Almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH. SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dan memberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim” tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan penulisan Usulan Penelitian ini adalah disusun sebagai syarat kurikulum pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Pada Konsentrasi Administrasi Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya.

Selama masa penulisan, penulis menyadari banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga Usulan Penelitian ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orangtuaku Bapak Duni dan Ibu Darti yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materiil serta pengorbanan yang tiada batas.
2. Saudaraku Fariz Laily Romadon, A.md dan Nadia Feby Nurjanah yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengetahuan kepada saya dalam penulisan skripsi.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan pengetahuan kepada saya dalam penulisan skripsi.
8. Seluruh Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim.
9. Seluruh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim.
10. Fatner terbaikku Muhammad Arsyadillah yang selalu memberi motivasinya hingga penyusunan skripsi selesai.
11. Dan teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga Usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, Mei 2018

Penulis

ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian ini adalah pemeliharaan hewan ternak belum berjalan sesuai dengan peraturan daerah dan masih lemahnya pengawasan satuan polisi pamong praja terhadap penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim berdasarkan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2002. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model teori William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan data dan informasi yang didapat, masih adanya pelaksanaan kebijakan penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang belum terealisasi. Hal tersebut dapat terlihat dari masih terdapat kendala-kendala dilapangan dimana masih adanya peternak yang meliarkan hewan ternaknya di jalan umum sehingga mengganggu pengguna jalan dan masih ada hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik tanpa adanya penertiban atau sanksi yang diberikan satuan polisi pamong praja dan masyarakat yang menganggap hewan ternaknya tidak masalah untuk diliarkan tanpa adanya penjagaan dari pemilik ternak. Dalam hal ini ada beberapa saran yang direkomendasikan yaitu hendaknya dapat mensosialisasikan kembali kepada peternak yang belum mengenal tentang peraturan daerah dan Satuan polisi pamong praja Kabupaten Muara Enim hendaknya pada pelaksanaan di lapangan sebaiknya petugas pelaksana meningkatkan penjangkauan/pengawasan dilapangan secara rutin.

Kata kunci : Evaluasi, Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat

Pembimbing I



Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Indralaya, Juli 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S. Sos., M.P.A
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The background of this research problem is the maintenance of livestock has not been run in accordance with local regulations and still weak supervision of civil service police units to control the maintenance of four-legged animals. this study aims to evaluate the implementation of the Policy of Order Control of Livestock Leg Legal in Lawang Kidul Subdistrict, Muara Enim Regency based on the regional regulation No. 9 of 2002. the type of research in this thesis is descriptive research, using qualitative research methods and data collection techniques conducted through observation, interview and documentation. This research uses William N. Dunn's theory model. the results showed that the implementation of Policy of Order Control of Livestock Four Legs In District Lawang Kidul Muara Enim Regency has not fully run optimally. based on the data and information obtained, there is still implementation of the policy of curbing the maintenance of four legged animals in Lawang Kidul District Muara Enim Regency that has not been realized. It can be seen from there are still obstacles in the field where it is still therebreeders who let their livestock on public roads interfere with road users and there are still livestock roaming the public sphere without any order or sanction given by the civil service police forces and the people who consider the livestock to be a problem left without custody from livestock owners. in this case there are some recommended suggestions that should be socialized back to the farmers who do not know about the local regulations and civil service police unit Muara Enim regency should be on the implementation in the field should the implementing officers improve outreach / supervision on the ground regularly.

Keywords: Evaluation, Control of Four-legged Livestock Farming

Advisor I


Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Advisor II


Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Indralaya, July 2018
Chairman of the Departement of public administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya university


Zailani Surya Marpaung, S. Sos., M.P.A
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER HALAMAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO & PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Praktis.....	14
2. Manfaat Teoritis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	16
1. Kebijakan Publik	16
2. Evaluasi Kebijakan Publik.....	20
3. Peneliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat	28
4. Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak	30
B. Kerangka Pemikiran.....	33
C. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Definisi Konsep	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Data Dan Sumber Data	38
1. Data.....	38
2. Sumber Data	38
A. Data Primer	38
B. Data Sekunder	38
E. Informan Penelitian.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	41
H. Teknik Keabsahan Data.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	45
1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	45
2. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	50
B. Evaluasi Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim	55
a. Dimensi Efektivitas.....	55
1. Pencapaian Tujuan Kebijakan	56
2. Pencapaian Sasaran Kebijakan	59
b. Dimensi Efisiensi.....	63
1. Pelaksanaan Kegiatan Di Lapangan	64
2. Adanya Target Pencapaian Waktu.....	75
c. Dimensi Kecukupan.....	77
1. Kualitas dan Kuantitas Aparatur Sumber Daya Manusia	78
2. Dana/Anggaran	79
3. Fasilitas	83
d. Dimensi Perataan	86
1. Pelaksaaan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Kepada Peternak	86
2. Manfaat Bagi Peternak.....	94
3. Manfaat Bagi Masyarakat	95
e. Dimensi Responsivitas.....	96
1. Adanya Tanggapan Positif dan Negatif dari Masyarakat yang Memiliki Hewan Ternak	98
f. Dimensi Ketepatan.....	99
1. Kegunaan Kebijakan.....	99
2. Adanya Perubahan Yang di Alami Peternak	101
C. Hasil Analisis Pelaksanaan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
1.1 Populasi Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2015	6
1.2 Populasi Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Muara Enim Tahun 2016	7
1.3 Kecamatan Yang Menjadi Fokus Dalam Penelitian	7
1.4 Data Pemilik Hewan Ternak Berkaki Empat	8
1.5 Penertiban Hewan Ternak Berkaki Empat Tahun 2014-2015	11
2.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan	27
2.2 Penelitian Terdahulu	34
3.1 Fokus Penelitian	37
4.1 Penertiban Hewan Ternak Berkaki Empat Tahun 2014-2015	66
4.2 SOP (Standar Operasional Prosedur) Pemeliharaan Hewan Ternak Kaki Empat	69
4.3 Hasil Analisis Tentang Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
2.1 Gambar Kerangka Pemikiran	34
4.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim	50
4.2 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim.....	54
4.3 Hewan Ternak yang Melanggar Penertiban	67
4.4 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Penertiban Tahun 2014.....	68
4.5 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Penertiban Tahun 2015.....	69
4.6 Pemeliharaan Hewan Ternak yang Digembalakan	70
4.7 Pemeliharaan Hewan Ternak yang Diliarkan Tanpa Penjagaan	71
4.8 Pemilik Hewan Ternak Yang Sedang Mengurus Ternaknya Yang Diajukan Ke Pengadilan	74
4.9 Fasilitas yang Terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja	84
4.10 Pemeliharaan Hewan Ternak yang Digembalakan	89
4.11 Pemeliharaan Hewan Ternak yang Diliarkan.....	91
4.12 Sosialisasi Melalui Perangkat Desa	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2002 Tentang Kebijakan Pemeliharaan Hewan Ternak	109
2. Surat Tugas	114
3. Surat Keputusan	115
4. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I	116
5. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II	118
6. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi	120
7. Lembar Revisi Ujian Komprehensif	122
8. Pedoman wawancara	123

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan daerah tropis dimana luas lautan lebih luas dibandingkan daratan. Sebagian besar masyarakatnya (sekitar 60% dari total populasi) pada umumnya penghasilannya dari pertanian dan peternakan. Sebagai negara yang kaya akan hasil bumi maka Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar, yang dapat dieksplorasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di Indonesia ditemukan tidak kurang dari 945 jenis tanaman asli Indonesia yang terbagi menjadi 77 jenis sumber karbohidrat, 75 jenis sumber lemak/minyak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 40 jenis bahan minuman, 110 jenis rempah-rempah dan bumbu-bumbuan, serta 17% species dunia ditemukan di Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut bahwa potensi alam tersebut akan sia-sia apabila tidak di manfaatkan dengan baik.

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar tersebut maka secara otomatis merupakan potensi pasar yang luar biasa khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan termasuk kebutuhan pangan hewani asal peternakan.

Dalam konteks ini peluang agribisnis peternakan terbuka luas dalam penyediaan kebutuhan konsumsipangan dan ini merupakan salah satu tantangan nyata yang sekaligus peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan sektor peternakan. Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja dibidang peternakan maka pemerintah sebagai eksekutif harus campur tangan dalam pengembangan peternakan tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan, aturan, dan regulasi tentang pengelolaan hewan ternak agar arah potensi peternakan bisa dikelola dengan baik agar kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai kebutuhan bersama.

Peternakan merupakan salah satu faktor ekonomi yang vital, sebagai sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan penghasil komoditi ekspor maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang peternakan yang tertuang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan dipertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Dalam Undang-Undang ini diatur beberapa aspek di bidang peternakan antara lain, tujuan penyelenggaraan peternakan yang tertuang dalam pasal 3 :

- a. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- b. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa hewan secara mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional
- c. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan
- d. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat
- e. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Melihat dari tujuan penyelenggaraan dari peternakan dan kesehatan peternakan, maka perlu adanya kebijakan yang mengawasi penyediaan hewan ternak dan tersenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyedia pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Indonesia merupakan negara hukum dimana masyarakatnya harus taat akan hukum tersebut, termasuk pemerintah mengatur tentang penertiban hewan peliharaannya.

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara yang di kembangbiakkan untuk di konsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum. Ternak dapat berupa binatang apapun. Namun, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia domestik, seperti ayam, angsa, kalkun, atau itik untuk unggas, serta babi, sapi, kambing, domba, kuda, atau keledai untuk mamalia. Untuk mendapatkan hewan yang sehat dan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, perlu adanya perhatian dari pemilik peternakan dalam memenuhi kriteria sehat dalam merawat hewan ternak. Perawatan yang di maksud disini adalah kandang hewan.

Praktek pemeliharaan hewan ternak amat bervariasi di berbagai tempat di dunia, dan bervariasi pula antara jenis hewan. Hewan ternak umumnya dipelihara di dalam kandang dan diberi makan atau diberikan akses menuju makanan (digembalakan). Beberapa tidak mengkandangkan hewannya atau membiarkan hewan memilih kapan akan masuk kandang (jelajah bebas). Pemeliharaan hewan ternak dalam sejarah merupakan bagian dari kehidupan kaum nomaden yang berpindah-pindah mengikuti musim.

Sanitasi kandang adalah suatu kegiatan untuk kebersihan kandang dan lingkungannya. Dimana kandang hewan umumnya hanya digunakan tempat dimana hewan ternak berkaki empat akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur dan diberi makan. Sanitasi kandang diharapkan dapat mencegah penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dalam rantai perpindahan penyakit. Adapun Kandang yang baik tidak harus dibuat dari bahan-bahan yang mahal, karena dapat dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang terdapat disekitar kita, misalnya menggunakan bambu, batang kayu yang cukup besar, dan bahkan untuk atap dapat menggunakan rumbia/alang-alang.

Pemberian hijauan pakan ternak (HPT) dan konsentrat adalah kegiatan rutin yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi harian ternak. Bertujuan menjamin kebutuhan asupan gizi harian ternak guna menunjang energi dan materi untuk pertumbuhan dan produksi ternak yang dipelihara. Pakan merupakan sumber zat gizi yang diperlukan untuk hidup pokok dan pertumbuhan. Karena pakan merupakan sumber zat gizi ternak ternak tidak saja perlu pakan dalam jumlah yang cukup (kuantitasnya) namun juga diperlukan pakan yang berkualitas sehingga kombinasi pakan yang berkualitas dengan jumlah (kuantitas) yang cukup akan memberikan peluang kepada ternak yang dipelihara untuk mendapatkan sejumlah gizi untuk keperluan pertumbuhannya.

Pengelompokan ternak dapat dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama ternak besar yaitu sapi dan kerbau, dan kelompok ternak kedua ternak kecil yaitu kambing dan domba. Menurut Parakkasi (1999) ada beberapa keuntungan yang dapat diambil manfaat dan hasilnya dengan memelihara hewan ternak ini, antara lain dapat memanfaatkan sisa hasil pertanian dalam jumlah cukup besar, dan apabila ternak tersebut dipelihara secara intensif dapat menyerap tenaga kerja. Hewan-hewan ini dapat dijadikan pilihan untuk ditanamkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu usaha agribisnis seperti peternakan harus mempunyai tujuan, yang berguna sebagai evaluasi kegiatan yang dilakukan selama beternak benar atau salah. Tujuan peternakan yaitu tujuan komersial sebagai cara memperoleh keuntungan.

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang optimal, diperlukan adanya upaya keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah secara terpadu. Pertanian merupakan sektor yang menjadi prioritas pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sangat potensial untuk dikembangkan sektor pertanian, misalnya subsektor peternakan. Peternakan merupakan sumber investasi

yang menjanjikan bila dikembangkan dengan baik dan sebagai alternatif upaya pencapaian cita-cita pembangunan.

Kabupaten Muara Enim adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Muara Enim. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris. Selain itu mata pencaharian masyarakatnya mengandalkan bertani, beternak, berkebun dan pertambangan. Hal ini jika dikembangkan akan bisa menambah hasil pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim itu sendiri. Sementara itu pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak. Sejalanannya peraturan pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah Kabupaten Muara Enim membuat suatu peraturan atau kebijakan serupa dalam rangka mewujudkan penertiban hewan berkaki empat yang sering berkeliaran di jalan umum dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No 9 Tahun 2002 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat khusus mengatur masalah sistem Larangan terdapat pada Bab III pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pemilik ternak dilarang melepaskan dan membiarkan berjalan dan atau sengaja membiarkan ternaknya berkeliaran di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum".

Ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan potensi peternakan sebagai sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Peraturan daerah ini juga diatur pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk menertibkan dan memberikan petunjuk tatacara pemeliharaan hewan ternak kepada masyarakat dari pelaku usaha peternakan agar tidak menimbulkan masalah sosial yang mengganggu masyarakat.

Berdasarkan beberapa fakta-fakta yang telah diuraikan permasalahan yang ada diatas bahwa ada berbagai macam masalah-masalah yang ditimbulkan terutama berkaitan dengan hewan ternak yang tidak di kelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti menimbulkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan kotornya lingkungan sekitar yang ditimbulkan oleh liarnya hewan ternak di Kabupaten Muara Enim. Berikut dapat dilihat dalam tabel data jumlah populasi ternak berkaki empat berdasarkan data dari dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Muara Enim tahun 2013-2015 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Populasi Hewan Ternak Berkaki Empat di Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2015

No	Tahun	Jenis Ternak					
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	2013	13.190	3.594	147	52.254	5.542	285
2	2014	13.424	3.633	154	52.296	5.561	299
3	2015	13.960	3.693	161	52.537	5.680	221

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan data Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Muara Enim Tahun 2016

Peningkatan jumlah populasi ternak berkaki empat di Kabupaten Muara Enim terjadi peningkatan dari tahun ketahun. Ketidakseimbangan antara lahan peternak dengan populasi hewan ternak membuat ternak dibiarkan liar. Pembiaran ini menimbulkan masalah dikabupaten Muara Enim masalah yang timbul adalah masalah lingkungan, kenyamanan maupun kemandirian bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Berikut dapat dilihat dalam tabel data jumlah populasi ternak berkaki empat di Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dapat dilihat berdasarkan tabel 2,1 populasi hewan ternak berkaki empat di Kabupaten Muara Enim tahun 2016. Sebagai berikut :

Tabel 2.1 Populasi Hewan Ternak Berkaki Empat di Kabupaten Muara Enim Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Ternak					
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	Semende Darat Laut	123	67	42	3.185	317	0
2	Semende Darat Ulu	224	628	68	1.497	15	0
3	Semende Darat Tengah	51	171	42	957	35	0
4	Tanjung Agung	169	750	0	5.221	444	0
5	Rambang	284	11	0	1.641	123	30
6	Lubai	360	11	0	2.423	374	0
7	Lawang Kidul	1.872	239	0	5.222	104	0
8	Muara Enim	965	560	6	835	339	0
9	Ujan Mas	437	16	0	1.369	226	0
10	Gunung Megang	1.232	280	1	5.799	390	0
11	Benakat	522	11	4	3.562	227	0
12	Rambang Dangku	2.543	539	2	5.894	483	196
13	Gelumbang	2.549	129	0	2.803	669	12
14	Lembak	30	8	0	2.278	1.040	0
15	Sungai Rotan	698	112	0	972	243	0
16	Muara Belida	698	89	0	844	162	0
17	Kelekar	657	8	0	1.551	228	0
18	Belimbing	425	57	4	844	92	0
19	Belide Darat	68	29	0	1.551	132	0
20	Lubai Ulu	399	11	0	2.711	167	0
Jumlah		14.185	3.724	169	52.920	5.810	238

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim Tahun 2016

Berdasarkan jumlah populasi hewan ternak berkaki empat di Kabupaten Muara Enim diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Kecamatan Lawang Kidul yang dilihat dari tabel 3 berikut ini :

Tabel 3.1 Kecamatan yang Menjadi Fokus dalam Penelitian

Kecamatan	Jenis Ternak					
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Lawang Kidul	1.872	239	0	5.222	104	0

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim Tahun 2016

Lawang Kidul adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Muara Enim. Pada Kecamatan Lawang kidul memiliki luas wilayah 170.05 km². Kecamatan ini berjarak kurang lebih 12 km dari Kabupaten Muara Enim. Kecamatan Lawang Kidul memiliki 7 desa / kelurahan diantaranya yaitu Desa Darmo, Desa Keban Agung, Desa Lingga, Desa

Tegalrejo, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kelurahan Tanjung Enim dan Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Kecamatan Lawang Kidul juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah salah satunya pertambangan batubara sehingga ketertiban lalu lintas harus nyaman, tertib dan kondusif. Hal ini yang membuat menjadikan penulisan memfokuskan lokasi penelitian di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Jenis ternak yang dipelihara oleh masyarakat kecamatan lawang kidul adalah ternak besar yaitu sapi dan kerbau, dan ternak kecil yaitu kambing dan domba. populasi ternak besar yang dipelihara masyarakat kecamatan lawang kidul untuk ternak sapi tahun 2016 sebanyak 1.872 ekor, sedangkan untuk ternak kerbaunya sebanyak 239 ekor, untuk ternak kecil untuk ternak kambing sebanyak 5.222 ekor, sedangkan untuk dombanya sebanyak 104 ekor dari total populasi yang ada. (Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muara Enim Tahun 2016)

Berikut dapat dilihat dalam tabel data pemilik hewan ternak berkaki empat di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Dapat dilihat berdasarkan tabel 4.1 data pemilik hewan ternak berkaki empat di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2016. Sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Pemilik Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Tahun 2016

No	Desa	Nama Peternak	Jenis Ternak	
			Kambing	sapi
1.	Darmo	Paiman	62	14
		Budi	42	16
		Suparman	68	0
		Pejok	45	12
		Senin	53	21
		Rebo	60	3
		Jumalik	50	15
		Rudi	57	22
		Sarju	60	5
		Reno	49	20

		Sudarsa	55	15
		Otong	46	13
		Rahman	49	7
		Sarda	60	10
		Sardi	51	14
		Acep	41	12
		Rusman	50	18
2.	Keban Agung	Edi	53	15
		Hariyanto	60	7
		Kemis	58	32
		Legi	55	27
		Aman	48	17
		Yanto	55	27
		Farid	59	32
		Ridwan	52	23
3.	Lingga	Gimok	55	20
		Wardoyo	61	16
		Suyono	46	23
		Kasmi	50	18
		Sibon	46	23
		Singkut	55	27
		Agustin	45	21
		Febriansyah	60	17
		Dinda	46	21
		Rahmad	65	5
		Rima	55	20
		Ismail	60	32
4.	Tegal Rejo	Sukiman	58	21
		Ihsan	49	22
		Hidayat	62	23
		Tohir	57	17
		Yusuf	39	20
		Wardoyo	55	26
		Romadon	56	23
		Bela	62	12
		Andre	47	24
		Agus	56	23
		Ipan	52	20
		Hendrik	50	15
		Suhanto	49	20
		Pomo	47	21
		Agung	55	19
		Dimas	50	17
5.	Tanjung Enim Selatan	Pandu	57	21
		Ari	45	27

		Abdul Jalil	48	25
		Robi	58	25
		Supardi	55	21
		Cahyo	50	20
		Toyok	56	26
		Agus	57	31
		Edi Herfani	50	28
6.	Tanjung Enim	Sutrio	45	23
		Hendrik	51	21
		Toni	50	23
		Tuti	56	17
		Fauzan	38	28
		Dillah	45	27
		Muhammad	67	10
		Juni	41	23
		Sabar	50	21
		Jumat	45	12
		Kliwon	56	23
		Pohan	71	2
		Diki	42	23
		Riki	43	26
7.	Pasar Tanjung Enim	Senin	67	12
		Idwar	55	15
		Erdaheli	45	20
		Herwanto	46	22
		Azhari	55	24
		Slamet Mulyono	50	23
		Suharto	49	23
		Sugiarto	54	37
		Tanzil	60	31
		Juni	62	27
		Heri	52	31
		Ruswanudin	42	20
		Goffar	67	4
		Juli	41	31
		Dartok	55	23
		Agus	63	27
		Ahmad	62	36

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim Tahun 2016

Berdasarkan masalah yang sering ditemukan yaitu bebasnya hewan ternak atau dipelihara dengan cara dilepas di pekarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan dimasyarakat dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang

berkeliraran di jalan umum. Kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota padahal sudah ada peraturan daerah yang mengatur masalah ini dan masuk perkarangan perusahaan PT. Bukit Asam. Berikut dijelaskan mengenai penertiban hewan berkaki empat yang di tahun 2014-2015 yang sering dilakukan di Kecamatan Lawang Kidul. Dan pada tahun 2016 dan 2017 melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan serta melakukan sosialisasi melalui radio, pembuatan banner dan surat edaran perda serta melakukan sosialisasi kembali kepada perangkat Desa.

Berdasarkan tabel 4.2 di bawah ini dijelaskan bahwa satuan polisi pamong praja melakukan penertiban hewan ternak berkaki empat setiap tahunnya, penertiban dilakukan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim terhadap hewan ternak yang sering mengganggu masyarakat baik yang berkeliraran mengganggu ketertiban umum lalu lintas dan ruang publik. Kecamatan Lawang Kidul salah satunya melakukan penertiban hewan ternak berkaki empat. Penertiban dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat setempat mengenai hewan ternak yang melakukan pelanggaran.

Tabel 4.2 Penertiban Hewan Ternak Berkaki Empat Tahun 2014-2015

No	Program Kegiatan	Tanggal	Bulan	Lokasi	Tahun	Hasil Penertiban Hewan Ternak
1	Penertiban Hewan Ternak Berkaki Empat	5,6,15,16,17,18	Juni	Kecamatan lawang kidul	2014	8
2	Penertiban Hewan Ternak Berkaki Empat	5,10,16,17	Juli	Kecamatan lawang kidul	2015	2

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan data Satuan polisi Pamong Praja kabupaten Muara enim Tahun 2016

Dalam pengamatan penelitian tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat di Kecamatan Lawang Kidul dalam proses menjalankan peraturan daerah ini masih ditemukan berbagai kendala dan masalah yang membuat kebijakan ini belum berjalan maksimal. Karena Pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Lawang Kidul dan

masih lemahnya pengawasan satuan pamong praja terhadap penertiban hewan ternak berkaki empat. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya :

1. Pemeliharaan Hewan Ternak Belum Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002

Kurangnya kepatuhan peternak dalam memelihara hewan ternaknya yang berkaitan dengan pakannya terhadap hewan ternak berkaki empat seperti sapi dan kambing dimana hewan-hewan ternak tersebut berkeliaran di jalan-jalan umum yang dapat menimbulkan terjadi kecelakaan lalu lintas khususnya Kecamatan Lawang Kidul dan mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan, menimbulkan keresahan dimasyarakat yang mana hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas tadi masuk ke perkarangan rumah orang lain dan masuk ke perkarangan perusahaan PT. Bukit Asam dan tambang batu bara serta kotoran ternak yang berserakan diperkarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota. Ternak yang bebas berkeliaran sebagai akibat kelalaian dari yang peternak dianggap pelanggaran terhadap peraturan daerah. Pemilik hewan tersebut juga tidak menyadari bahwa betapa besarnya resiko telah membiarkan ternaknya berkeliaran, serta kurangnya kerjasama masyarakat dengan petugas dalam pengawasan hewan ternak tersebut.

2. Masih Lemahnya Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat

Pengawasan dan pengendalian hewan ternak liar Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh dinas peternakan dan satuan pamong praja Kabupaten Muara Enim untuk menjalankan peraturan. Upaya untuk menegakkan peraturan dapat tercapai dengan tindakan tegas dengan sosialisasi serta memberikan pengertian kepada peternak tentang kewajiban untuk mengkandangan hewan

ternaknya berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2002 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak.

Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah salah satu tahap dalam proses pengendalian hewan ternak liar agar terpelihara dengan baik dan kesehatan hewan dapat dipantau dengan mudah. Didalam penelitian ini berdasarkan data penertiban pemeliharaan hewan ternak hanya membatasi pada penertiban terhadap hewan ternak sapi dan kambing. Alasan peneliti dalam memilih hewan ternak tersebut, dikarenakan hewan-hewan ternak tersebut berkeliaran sehingga masuk perkarangan perusahaan PT. Bukit Asam dan banyak yang menyebabkan masalah seperti menyebabkan kecelakaan dan mengganggu ketertiban serta merusak kebersihan di areal jalan raya, tempat-tempat lainnya sehingga mengganggu kenyamanan.

Berdasarkan data jumlah hewan ternak berkaki empat yang ada di kecamatan lawang kidul. Satuan Polisi Pamong Praja hanya mendapatkan sedikitnya 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang dilaporkan. Pengawasan dan pengendalian hewan ternak liar Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim untuk menjalankan peraturan. Kenyataannya berdasarkan pengamatan sementara penulis, masih banyak hewan berkaki empat yang berkeliaran diruang publik.

Oleh sebab itu dapat di pahami bahwa masalah yang ditimbulkan oleh penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah di selesaikan melihat dan menanggapi fenomena yang telah digambarkan sebelumnya maka inilah alasan yang menarik untuk dibicarakan atas terpilihnya penelitian ini dengan mengangkat judul **“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul**

Kabupaten Muara Enim". Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dikaji lebih lanjut, agar dapat diketahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim" ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk "Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim".

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tinjauan atau masukan bagi semua kalangan terkhusus bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak yang terkait dalam memahami lebih lanjut sehubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi atau referensi bagi masyarakat untuk mengetahui ilmu kebijakan publik khususnya pada bidang evaluasi kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dunn, N, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi ke 2. Diterjemahkan Oleh: Samodra wibawa, Dkk. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Muslim, Tapip. 2015. *Budidaya Ternak Kambing*. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim
- Muslim, Tapip. 2015. *Budidaya Sapi Bali*. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kebijakan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung Alfabeta
- Tayibnapis.Yusuf Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan Dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan

- Peraturan Daerah No 9 Tahun 2002 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Internet :

- Haerul. 2010, Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros, (Online),
- (<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9637/SKRIPSI%20LENGKAP-FISIP-ADM-HAERUL.pdf?sequence=1> diakses 4 maret 2014)

Sumber Data dari Skripsi :

- Hidayat, Taufiq. 2007. *Pengembangan Ternak Ruminansia Berdasarkan Ketersediaan Lahan Hijauan Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Musi Rawas*. Skripsi, Jurusan Peternakan, PERTANIAN, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Susantina, Septika. 2007. *Pengembangan Populasi Ternak Ruminansia Berdasarkan Ketersediaan Lahan Hijauan Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan*. Skripsi, Jurusan Peternakan, PERTANIAN, Universitas Sriwijaya, Indralaya.